

GETTING THE INFLUENCE OF COMMUNITY CHOICE IN BANYUWANGI DISTRICT, 1960-2000 BY MUHAMMADIYAH ORGANIZATION

**PEREBUTAN PENGARUH MASSA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1960-2000 OLEH
 ORGANISASI MUHAMMADIYAH**

Lutfiyatul Hasanah
 Guru IPS (sejarah) SMPK Muncar
 dwiyaita49@gmail.com

(*) Corresponding Author
 +62 823-3119-3233

How to Cite: Hasanah. (2018). Title of article. Santhet, 2(2), 16-30. doi:

Received : 25 meii 2018
 Revised : 19 agustus 2018
 Accepted: 30 oktober 2018

Keywords: pengaruh ;
 massa;
 organisasi;

Abstract

Muhammadiyah is one of the Islamic organizations in Indonesia. The existence of Muhammadiyah in Banyuwangi creates a conflict for Muslims, especially in Banyuwangi. This relates to the existence of the NU organization which had been established earlier than the Muhammadiyah organization. The existence of the Muhammadiyah organization which was overshadowed influenced the power of NU which affected the number of masses who followed the two organizations. In its development the Muhammadiyah organization became a political party. This is influenced by the condition of the community, assistance from charities, and the role of the government. This is also what indirectly becomes the influence of the masses to be in it.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Islam yang memiliki tujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang diajarkan oleh ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, melalui amal usaha- amal usahanya. Adanya organisasi Muhammadiyah adalah akibat dari perubahan batin dan kedalaman pemahaman terhadap Islam, yang diimbangi oleh perkembangan masyarakat dalam hal alokasi fungsi, fasilitas, pendidikan, dan lain sebagainya (Mursidi, 2019). Sebagai akibat dari hal tersebut, maka perbedaan pandangan tentang ke-Islaman meruncing dikalangan bawah masyarakat awam, baik warga simpatisan Muhammadiyah. Mereka gampang sekali konflik dan sulit berdamai, hanya masalah-masalah kecil yang didorong dengan adanya fanatisme golongan atau kelompok yang kurang propesional (mursidi, 2019).

Menurut Adaby Darban (2000) bahwa, komunitas Muhammadiyah lahir dengan membentuk sebuah komunitas dengan penerapan Islam secara formal dan berorientasi pada kegiatan yang bersifat sosial, seperti pembangunan Masjid, sekolah model barat dan klinik kesehatan. Kendati, Muhammadiyah lahir merupakan sebuah kebutuhan dan respon yang mendesak untuk mengejar ketertinggalan umat Islam, terutama masyarakat kota yang melihat keterpurukan umat (Pranowo,1998).

Munculnya organisasi modern Islam juga memunculkan polemik yang kompleks dalam lingkup masyarakat Islam sendiri. Perlu diketahui dengan munculnya orientasi yang sifatnya modern pada umat Islam tidak serta merta mnghilangkan komunitas Islam Islam tradisional yang selama ini diwakili oleh NU. Tidak hanya berhenti di situ saja, dengan didasari oleh nasionalisme yang merupakan salah satu kunci penggerak munculnya organisasi pada awal abad ke-20 (Suhartono,2001).

Muhammadiyah juga tampil menjadi pelopor dalam menentang terhadap kebijakan kolonial, sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan yang melibatkan salah satu tokoh Muhammadiyah dalam melakukan aksi pemogokan dengan buruh-buruh perkebunan dan pabrik milik Belanda, hal ini berawal dari kebijakan Belanda yang merugikan para buruh. Klimak dari aksi pemogokan ini mengakibatkan A.R Fakhruddin, yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah masuk penjara, karena partisipasinya dalam aksi tersebut (Nashir,2001).

Dari membaca konsep Kepribadian Muhammadiyah dapat digambarkan sebagai sebuah situasi rumit yang dihadapi organisasi Muhammadiyah ketika berhadapan dengan politik. Kenyataan sosiologis menunjukkan, bahwa hubungan Muhammadiyah dengan politik itu beragam dan tidak linier. Hal ini, berangkat dari suatu permasalahan yang memosisikan Muhammadiyah sebagai salah satu pihak yang secara yuridis bukan merupakan sebuah partai politik.

Sebagai bagian dari kota pesisir utara Jawa, wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan tempat mengakarnya tradisi Islam tradisional, hal tersebut di buktikan dengan munculnya banyak tokoh Islam tradisional dari daerah Banyuwangi. Dalam masa penyebaran dan pelembagaan Islam di pesisir utara Jawa-masa kedatangan Islam di pulau Jawa-wilayah Banyuwangi yang termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Demak, merupakan salah satu pintu masuk sekaligus berfungsi sebagai kota pusat komunitas Islam (Graff,2003). Disamping merupakan kontak dan jaringan dagang masyarakat pribumi dengan para pedagang Islam yang membawa budaya dan agama baru (Azra,2005). Pertautan ideologi masyarakat pesisir yang berupa agama Islam, merupakan wahana perkembangan ideologis sekaligus hubungan psikologis antara penyebar Islam (Wali atau Kyai) dengan para muridnya (santri). Lambat laun perkembangan Islam mulai menyebar ke pedalaman pulau Jawa yang merupakan hasil 'kerja' para santri dalam pengembaraan dakwah mereka.

Bagi Muhammadiyah dalam penyebaran pemahamannya di pesisir utara Jawa, termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi perkembangan yang bersifat kelembagaan dan tidak berorientasi yang bersifat penetrasi sangat beragam dalam perkembangannya. Di sisi, lain seperti wilayah Pekajangan dan Lamongan daerah Muhammadiyah di pesisir utara Jawa lainnya, lebih menunjukkan sifat perkembangan yang signifikan. Kendati, ketika dibandingkan dengan dominasi yang bersifat lembaga dan massa yang dimiliki NU, Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Banyuwangi jelas tidak berimbang. Sependapat dengan Steenbrink (1994) yang menyatakan bahwa, Muhammadiyah cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat kota yang sekaligus berperan sebagai pusat perdagangan, sehingga tidak mengherankan jika Muhammadiyah di Banyuwangi lebih banyak berkonsentrasi di kota-kota kecamatan, disamping itu Muhammadiyah di Banyuwangi personalnya didominasi oleh para pegawai negeri.

Dalam kasus Muhammadiyah di wilayah Banyuwangi, cukup sesuai dengan tulisan diketengahkan oleh Kuntowijoyo yang berjudul Muslim Tanpa Masjid (2001). Sebagai kelompok gerakan Islam 'pendatang' di wilayah pesisir utara Jawa, Muhammadiyah datang ke Banyuwangi didukung oleh orang-orang pendatang. Tanpa didukung patron-kliental dari masyarakat sebagaimana NU, Muhammadiyah dalam perkembangannya sulit untuk menerapkan kondisi sosial dan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi daerah Kauman Yogyakarta.

Tidak ayal lagi, kemunculannya telah membangkitkan konflik yang rumit dengan gerakan Islam tradisional NU yang telah lama mengakar di masyarakat Banyuwangi. Benturan dan konflik yang muncul antar dua pemahaman yang berbeda ini telah melahirkan warna yang berbeda dalam pemahaman beragama Islam. Bagi NU yang telah menempatkan diri di daerah pesisir utara Jawa, dengan didukung ribuan santri pesantren dan dibidani oleh kyai yang mempunyai hubungan patron-kliental serta memiliki motivasi untuk melestarikan

kebudayaan leluhur (Pranowo, 1998; Mulkan, 2000). Telah melahirkan Konsensus bagi masyarakat setempat terhadap legitimasi dan pelembagaan Islam lokal.

Pada akhirnya dengan mengikuti alur pemikiran di atas peneliti bermaksud untuk mengangkat sepak terjang organisasi Muhammadiyah di kawasan wilayah Kabupaten Banyuwangi, dalam suatu penelitian yang berjudul PEREBUTAN PENGARUH MASSA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1960-2000 OLEH ORGANISASI MUHAMMADIYAH.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau metode historis. Menurut Mursidi (2019) Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya. Dalam pengertian lebih khusus lagi metode penelitian sejarah seperti yang dikemukakan oleh Gilbert. J. Garraghan, bahwa penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Moleong 2000). Sehingga penulis dalam penelitian tentang perkembangan Muhammadiyah di Banyuwangi menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah metode sejarah yang disepakati adalah:

Heuristik

Heuristik merupakan sebuah ketrampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan (Moleong 2000). Cara yang dilakukan penulis dalam dataran ini merupakan kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data itu berupa sumber-sumber atau bukti-bukti tertulis seperti arsip, dokumen, artikel, surat kabar dan naskah yang sesuai dengan sumber dan akan digunakan penulis sebagai bahan penulisan yang dilakukan peneliti. Dalam pengumpulan data yang berupa sumber, ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam mencari sumber yang relevan adalah; (a) Wawancara; (b) Studi pustaka; (c) Observasi

Observasi

Sumber Sekunder
 Sumber sekunder yang dimaksud disini adalah merupakan data-data yang didapatkan dari seseorang atau lebih yang berada diluar struktur kepemimpinan dan melakukan studi pustaka pada bagian yang termasuk sumber sekunder yang berupa majalah, buku maupun data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mendapatkan sumber-sumber dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan:

- a. Perpustakaan Jurusan Sejarah
- b. Perpustakaan Wilayah Jawa Timur

Kritik Sumber

Setelah data dalam berbagai kategori terkumpul tahap berikutnya adalah melakukan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber (Moleong, 2000). Kritik sumber merupakan langkah dalam upaya memperoleh data atau sumber agar benar-benar dapat dicapai kredibilitas dan otentitas. Ada dua cara untuk menempuh hal ini.

Untuk membuktikan kesahihan data yang berupa arsip, dokumen, buku dan artikel, penulis melakukan pengecekan terhadap sumber diatas, sehingga mendapatkan sumber yang dapat dipercaya sekaligus dapat mencapai nilai pembuktian yang sebenarnya. Sementara itu, untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara dan memenuhi kerangka triangulasi, digunakan *cross-check* data, baik dari hasil sumber tertulis maupun sumber lisan atau wawancara, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat data yang membutuhkan pengecekan silang.

Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah (Moleong 2000). Di dalam proses interpretasi sejarah peneliti berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Teknik ini berfungsi setelah data-data yang telah mengalami kritik sumber maka dihubungkan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya harus

mengalami seleksi dan analisa tepat untuk menemukan situasi pelaku tindakan dan tempat peristiwa secara benar yang akhirnya akan menjadi rangkaian yang bermakna.

Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian dari data-data yang telah sempurna. Menurut Moleong (2000) bahwa, dalam penulisan sejarah harus memenuhi beberapa kaidah yaitu, detail faktual, struktur yang logis dan penyajian yang terang dan halus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif

Sebagai komunitas terbesar dari bangsa Indonesia, umat Islam tidak selalu bernasib baik. Pada tahun 1965-1966, umat Islam bersama Militer menumbangkan Orde Lama setelah penumpasan pemberontakan G30/SPKI. Setelah berakhirnya konflik horizontal-diliputi penghilangan manusia yang tidak terungkap-umat Islam memasuki suatu masa yang disebut dengan 'bulan madu'. Lahirnya Orde Baru, bagi umat Islam telah memberi harapan tersendiri, terutama kesempatan yang berupa kontribusi dalam perpolitikan nasional. Kondisi tersebut diperjelas dengan adanya hubungan 'mesra' antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru (Suara Muhammadiyah, 1999.No 1:14-15). Tidak ayal lagi, bila masa yang relatif singkat setelah tumbanganya Orde Lama, umat Islam termasuk komponen pemenang bersama militer dan komponen anti komunis lainnya.

Hubungan yang terjalin antara umat Islam-ketika menempatkan komunis dan Orde Lama sebagai lawan politik-dengan pemerintah hanya bersifat sementara, sebab ketika pemerintah Orde Baru dapat menancapkan kekuasaannya, pada akhirnya menempatkan umat Islam sebagai komunitas yang harus diwaspadai. Banyak faktor yang melahirkan paradigma negatif pemerintah Orde Baru dalam menempatkan umat Islam sebagai kelompok oposan, lagi pula akhirnya melahirkan sikap khawatir dan mencurigai pada setiap kegiatan umat Islam-

terutama kegiatan Islam politik-di Indonesia, meskipun dalam lingkup kecil. Faktor itu dimulai dari 'dosa sejarah' yang dilakukan oleh gerakan DI/TII dan keterlibatan Masyumi dalam 'pemberontakan' PRRI.

Sementara itu munculnya kebangkitan Islam di Dunia Islam juga merupakan suatu faktor yang juga menentukan bagi kebijakan pemerintah Orde Baru, terlebih lahirnya Orde Baru bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Islam yang dimotori kawasan Timur Tengah (Tebba, 2001:xviii).

Sejak marjinalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat Islam, hubungan Islam dan negara bersifat antagonistik, hubungan 'bulan madu' sebelumnya yang terjadi sudah dilupakan. Ketegangan konseptual yang muncul akibat 'pemaksaan' penggunaan asas tunggal telah melahirkan hubungan diametral antara umat Islam dengan negara, meskipun pada akhirnya kalangan Islam menerima asas tunggal dari pemerintah.

Pasang surut hubungan politik antara pemerintah Orde Baru dengan umat Islam sangat menarik dan cukup signifikan, sebab isu-isu yang lahir ketika pemerintah dengan kebijakan *floating mass system*, sarat akan benturan kepentingan umat Islam-sebagai komponen mayoritas-di tingkat lokal maupun nasional. Meminjam analisa AM. Fatwa-mantan tapol kasus subversif masa Orde Baru, yang membagi hubungan Islam dengan pemerintah menjadi empat fase (Suara Muhammadiyah, 1999.No1:14). Pertama, fase marjinalisasi umat atau peminggiran peran umat Islam yang berlangsung antara tahun 1968-1986. Banyak jaring-jaring dakwaan subversif yang disebarkan penguasa terhadap sikap oposisi yang diberikan kepada umat Islam. Semua organisasi Islam, baik yang bersifat politik praktis maupun gerakan sosial kemasyarakatan menjadi 'bidikan' penguasa, termasuk organisasi NU dan Muhammadiyah-sebuah representasi kekuatan ormas Islam di Indonesia. Kedua adalah fase *understanding*, fase ini ditandai dengan proses interaksi dan dialog antara kekuatan Umat Islam dan pemerintah, hal ini berlangsung antara tahun 1986-1989.

Banyak faktor yang melahirkan sikap umat Islam untuk lebih merapatkan hubungan dengan pemerintah, termasuk setelah periode penerapan asas tunggal oleh pemerintah terhadap semua organisasi. Namun, lahirnya hubungan yang erat antara umat Islam dengan pemerintah, berkaitan dengan bergesernya orientasi perjuangan umat Islam yang semula bersifat ideologis-politis beralih secara signifikan pada sifat kultural-ketika meminjam temuan Munir Mulkan-yang dipelopori kaum intelektual muslim, seperti Amien Rais, Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid.

Ketiga, merupakan sebuah fase akomodasionis yang berlangsung antara 1989-1998. fase ini ditandai dengan diakomodisirnya kepentingan umat Islam oleh penguasa, seperti kebebasan pemakaian jilbab, disahkannya RUU perkawinan, pembuatan Kompilasi Hukum Islam dan pendirian ICMI-sebuah wadah berkumpulnya intelektual muslim-yang selama ini dimarginalisasikan, termasuk banyak dari kalangan intelektual muslim ini berkibrah dalam bidang politik dalam lingkungan penguasa. Namun kecenderungan yang mengetengahkan sikap lunak penguasa tersebut lebih disebabkan oleh melemahnya kekuasaan penguasa Orde Baru, atau kalau meminjam istilah dari Adaby Darban, bahwa kedekatan Orde Baru dengan Islam lebih disebabkan oleh keroposnya kekuasaan pemerintah, sehingga mencari patron baru yaitu umat Islam (Suara Muhammadiyah, 2004.No 22:7).

Untuk fase keempat, lebih merupakan fase transisional kritis yang banyak melahirkan konfigurasi baru dalam menatap arti pluralisme.

Terlepas dari penolakan dan dukungan terhadap formalisasi syariah, ketika Orde Baru masih berkuasa, pemikiran tersebut masih bersifat wacana, sebab pemikiran yang berusaha melahirkan wacana formalisasi syariah dapat terjatuh UU Subversif, apalagi berusaha untuk mengaktualisasikan di depan publik. Memang memasuki dasawarsa 90-an, ketika penguasa mendekati kalangan Islam, apalagi terakomodisirnya beberapa

keinginan kalangan Islam oleh penguasa Orde Baru merupakan sebuah 'hadiah' tersendiri yang selama ini dinantikan umat Islam. Menurut Munawir Syadzali (Pranowo,1998), keberhasilan umat Islam yang berupa diakomodisirnya beberapa kepentingan umat Islam lebih disebabkan pendekatan kultural dan substansif daripada pendekatan politis umat Islam sebelumnya.

Bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU serta organisasi yang tidak berafiliasi kepada keduanya, fenomena akomodatif dari pemerintah kepada umat Islam merupakan sebuah langkah maju yang sangat diharapkan. Untuk organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah-yang secara terpaksa menerima asas tunggal Pancasila-pergeseran politik penguasa telah membawa sebuah harapan tersendiri, apalagi menyangkut kebebasan menjalankan agama dan kegiatan organisasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, Muhammadiyah setelah menikmati masa bersahabat dengan Orde Baru, tepatnya ketika bersama-sama mempunyai kesamaan dalam menumpas lawan ideologi dan politik yaitu komunis, dan dalam hal ini direpresentasikan oleh PKI. Terlepas dari perbedaan ideologi penguasa Orde Baru dengan kalangan Islam, PKI telah mendongkrak kiprah komunitas Islam di Indonesia setelah sebelumnya di marginalkan-terutama kalangan Islam Modernis-oleh penguasa Orde Lama. Untuk kondisi Kabupaten Banyuwangi, konflik yang mengetengahkan kelompok komunis dan militer dan komunitas Islam dipihak lain, telah secara langsung mewartakan keberadaan Muhammadiyah. Namun, ephuria yang 'sesaat' sebelum adanya kebijakan penguasa untuk mencegah kenangan masa lalu yang berupa ketidakstabilan politik dan negara, telah melahirkan kebijakan yang cukup mengkhawatirkan kalangan Islam dan Muhammadiyah pada khususnya.

Pemerintah Orde Baru yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah Banyuwangi secara langsung telah membuat organisasi Muhammadiyah menjadi 'jinak',

meskipun sebagian besar warga Muhammadiyah di Banyuwangi banyak yang duduk dan bekerja di instansi pemerintah dan secara politis banyak warga Muhammadiyah yang menjadi kader Golkar. Hal tersebut terjadi setelah Parmusi yang hasil konsensus oleh organisasi Islam, seperti Muhammadiyah menemui permasalahan yang berupa konflik internal partai. Menurut Pranowo (1998) setelah Orde Baru berkuasa, kebijakan massa mengambang yang dikeluarkan pemerintah telah meminimalisir kehidupan politik di tingkat masyarakat bawah-kehidupan politik partai hanya sebatas lingkup kabupaten, termasuk masyarakat Banyuwangi.

Bagi Muhammadiyah di Banyuwangi, kondisi politik yang tidak menguntungkan umat Islam telah melahirkan kebijakan untuk menggeser pendekatan dakwah yang dilakukan, meskipun fenomena dan kebijakan intern Muhammadiyah Banyuwangi merupakan kebijakan Muhammadiyah di tingkat nasional. Terlebih, bergesernya kebijakan Muhammadiyah di Banyuwangi juga kebetulan didukung keadaan internal Muhammadiyah, terutama warganya yang sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah organisasi Muhammadiyah lain, terutama yang berhasil dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyahnya. Banyaknya warga yang notebene pendatang dan bekerja di instansi pemerintah, menjadikan Muhammadiyah-terutama warganya-lebih eksis dalam dakwah di dalam instansi pemerintah, meskipun untuk awal kekuasaan Orde Baru, kondisinya belum begitu menguntungkan. Kemudian, di samping berusaha meningkatkan amal usahanya, fenomena yang mengetengahkan kalangan modernis lebih mendapat tempat di instansi pemerintah daripada kalangan tradisional, hal ini, berawal dari tingkat pendidikan yang menjadi latar belakang kalangan Islam modernis. Sebab, menurut Supriyo (2001) ketika penguasa Orde Baru melakukan depolitisasi terhadap masyarakat dan umat Islam khususnya, orang-orang Muhammadiyah dan kalangan Islam modernis pada umumnya berhasil dengan

mobilitas vertikal secara ekonomi-sosial bukan secara politis.

Di sisi lain, bagi komunitas NU-mayoritas di Banyuwangi-tidak dapat melakukan mobilisasi vertikal, sebab mereka lebih banyak tinggal di daerah pinggiran dan pedesaan, apalagi masih mempertahankan kehidupan pesantren yang didominasi sistem patron-kliental secara struktural. Akibatnya, masyarakat NU lebih banyak mendapatkan dampak depolitisasi dari pemerintah, sehingga mereka buta politik. Namun, hal tersebut tidak semuanya benar, sebab kebijakan yang diambil NU cukup beralasan, pertama pada awal kekuasaan Orde Baru, NU memerankan dirinya sebagai kelompok oposisi-apalagi NU di Banyuwangi berafiliasi PPP-terhadap pemerintah, sehingga pemerintah sangat menekan aktivitas masyarakat NU tetapi pemerintah tidak berhasil, baru memasuki dasawarsa 80-an NU lebih bersikap akomodatif terhadap pemerintah. Kedua, sikap yang diambil NU dalam bentuk menjauhi pendekatan pemerintah cukup beralasan pula, para elit NU khawatir terhadap pemerintah yang akan 'memakan' komunitas NU.

Dengan dimarjinalkannya NU secara politis di Banyuwangi, telah menjadikan Muhammadiyah sebagai 'rekanan' pemerintah, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan agama dan umat Islam. Banyak keuntungan yang dipetik termasuk lobi-lobi Muhammadiyah, baik secara internal terhadap pembangunan amal usahanya maupun kehidupan umat Islam. Namun, posisi yang menempatkan Muhammadiyah sebagai patron pemerintah, pada akhirnya bergeser ketika NU mengubah kebijakan oposisinya terhadap pemerintah. Terlebih, ketika Departemen Agama diserahkan kepada kalangan NU. Fenomena ini dalam lingkup Banyuwangi telah menjadi beberapa konflik horisontal antara Muhammadiyah dan NU, seperti kebijakan yang berakar atas dasar pemahaman berbeda.

1. Hubungan Dengan Pemerintah

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, yang hidup bersama organisasi-organisasi Islam lainnya, berada dalam kekuasaan penguasa orde baru yang otoriter dengan

mengandalkan birokrasi, sekaligus mengecilkan potensi kalangan Islam di Indonesia. Keadaan tersebut telah memberikan implikasi yang pelik terhadap Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya untuk tunduk dengan aturan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menjaga homogenitas ideologi. Terlebih ketika melihat pengalaman krisis Piagam Jakarta tahun 1945, penguasa Orde Baru sebagai penguasa yang anti komunis merasa khawatir dan mecurigai terhadap kekuatan Islam politik yang selama ini menempatkan diri menjadi rival sekaligus kekuatan politik tersendiri. Terlebih, dalam perjalanannya rezim tersebut menggunakan empat pilar dalam menjaga kekuasaannya, yaitu Militer, Golkar, Birokrasi dan konglomerasi (Umar,2003).

Untuk itu, Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970 telah memposisikan diri untuk menjadikan kekuatan Islam sebagai rival dalam kehidupan politik dan berupaya memarginalkan posisi Islam politik dari kancah politik nasional secara sistematis, baik dengan pengembosan kekuatan politik Islam -terutama kekuatan partai politik Islam, maupun dengan kebijakan *floating mass* (massa mengambang). Dalam sektor politik, penguasa orde baru mulai menancapkan kekuasaannya tahun 1971 melalui pemilu yang berhasil dimenangkan Golkar, sebuah kepanjangan tangan penguasa orde baru yang dikawal oleh manajemen birokrasi yang kuat dan kekuatan militer (Ricklef,2005).

Pada akhirnya, peristiwa itu melahirkan babak baru kehidupan organisasi Islam berupa situasi yang sangat sulit untuk mengembangkan ide dan visi dalam koridor ideologi Islam. Sebagai ormas Islam yang paling terakhir dalam 'menerima' Pancasila sebagai satu-satunya asas, Muhammadiyah-menurut Din Syamsudin-dalam menerima Pancasila lebih disebabkan oleh faktor politis dari daripada faktor teologis (Thaba,1996). Tarik menarik antara Muhammadiyah dan pemerintah mengenai penggunaan asas tunggal terjadi cukup 'alot', meskipun dengan pada akhirnya Muhammadiyah 'rela' untuk menggunakan ketentuan UU No. 8 tahun 1985. dengan demikian dalam komunitas organisasi Islam hampir dapat dikatakan

menerima 'pilihan' yang diajukan oleh pemerintah, walaupun ada beberapa kalangan organisasi Islam yang tetap pada pendiriannya dan beberapa tokoh Islam yang secara individu-kelompok petisi 50-menolak asas tunggal. Akibatnya, banyak diantara tokoh tersebut yang dikenakan pasal UU anti subversif-kebanyakan merupakan rekayasa pemerintah-oleh penguasa Orde Baru.

Meminjam pendapat Thaba (1996) yang membagi hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tiga kategori, yakni fase antagonis, fase resiprokal kritis dan fase akomodatif yang secara mendetail menguraikan perjalanan umat Islam. Dalam fase resiprokal kritis-sebuah masa penyaringan sekaligus penjinakan-diketengahkan permasalahan yang dihadapi semua organisasi Islam dalam hubungannya dengan negara, termasuk Muhammadiyah. Memang secara teologis pengakuan Pancasila sebagai asas tunggal bertolak belakang dengan pemahaman normatif syariah yang dipraktekkan Muhammadiyah. Namun, secara taktis untuk kelangsungan dakwah dan 'mencerdaskan' umat Islam harus dilakukan, apalagi Muhammadiyah jauh-jauh hari telah konsisten dengan gerakan sosial kemasyarakatan-sejak keluar dari Parmusi-dan berlepas diri dari kegiatan politik praktis, termasuk setelah adanya 'pembajakan' yang dilakukan J. Naro dan Imran Kadir dalam Parmusi.

Sementara itu, Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar warganya bekerja sebagai pegawai pemerintah mengalami dua kondisi yang cenderung bertolak belakang. Salah satu sisi, dengan keluarnya Peraturan pemerintah (PP) No. 2/1970 sebagai implementasi dari Undang-Undang (UU) No. 2/1970 mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hanya memiliki loyalitas tunggal, jelas telah mempersempit ruang gerak anggota Muhammadiyah, termasuk bagi warga Muhammadiyah yang aktif di Parpol (Parmusi) untuk melakukan kegiatan politik (Suwarno,2001).

Di sisi lainnya, Muhammadiyah-terutama para elit Muhammadiyah di Banyuwangi-mendapatkan kesempatan berkiper dalam

birokrasi pemerintah, apalagi banyak yang menjadi kader partai Golkar dan mendapatkan hubungan istimewa-mengalirnya patronase terhadap amal Muhammadiyah-dari pemerintah. Terlebih, hubungan akomodatif ini berlangsung dijalin secara baik dengan pemerintah, ketika Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. A.R. Fakhruddin, sebab dinilai beberapa pihak memiliki kecenderungan untuk lebih akomodatif terhadap pemerintah (Nashir,2001).

Kondisi tersebut, juga sesuai dengan pendapat Kamal Hassan (Nashir,2001), yang menggolongkan Muhammadiyah ke dalam kategori kelompok Islam akomodasionis, yang menjalin hubungan erat dengan pemerintah, berbeda dengan para tokoh Masyumi-walaupun secara struktural dibubarkanyang cenderung radikal. Hal tersebut, juga sama kondisinya dengan Muhammadiyah di daerah, termasuk Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. Sikap 'jinak' yang diperagakan oleh Muhammadiyah di Banyuwangi memang mendapatkan hasilnya ketika fase Islamisasi birokrasi-meminjam pendapat Tebba-berlangsung.

Banyak peran sentral tokoh Muhammadiyah yang diaktualisasikan dalam departemen-departemen milik pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Husain, seperti peran tokoh Muhammadiyah dalam peningkatan nilai religius para pegawai pemerintah, apalagi setelah pemakaian jilbab dilegalkan-terutama dalam lingkup sekolah-sekolah menengah negeri-pemerintah (Wawancara, 23 Agustus 2005). Selanjutnya, peningkatan tingkat religi yang merebak di kalangan pegawai pemerintah, terutama ditandai dengan banyak dibangunnya fasilitas umat Islam di instansi pemerintah, seperti pembangunan Masjid atau Mushola, apalagi kegiatan pengajian di hari besar Islam dan dibulan puasa (Tebba,2001:45). Bagi kalangan Islam, hal tersebut merupakan sebuah perubahan yang belum terjadi pada masa lalu, apalagi masa Orde Lama maupun masa awal Orde Baru.

Mengenai pelaksanaan kegiatan keislaman di instansi pemerintah daerah Banyuwangi banyak diperankan dan melibatkan para elite

Muhammadiyah, apalagi kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari para pegawai yang notabene bukan dari kalangan santri (Wawancara, Mohammad Abbas 15 Agustus 2005). Melihat fenomena ini keberhasilan kegiatan Muhammadiyah baru memasuki tahapan Islamisasi daripada sebuah proses puritanisasi, sebab jika proses puritanisasi dilakukan pada masa penguasa Orde Baru berkuasa akan berbenturan dengan kebijakan yang dimiliki pemerintah termasuk permasalahan teologis penerimaan asas tunggal oleh Muhammadiyah.

Bagi pemerintah, adanya elit Muhammadiyah yang kebetulan bekerja di instansi pemerintah juga memberikan kontribusi tersendiri, terutama bagi warga Muhammadiyah yang menjadi kader Golkar di Banyuwangi (Muhadi,1997). Memang umat Islam secara ritual ibadah, semasa Orde Baru berkuasa mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi sebaliknya dalam bidang politik mengalami kemunduran. Penguasa Orde Baru dengan tujuan menjaga kestabilan kekuasaan, sedikit banyak mewarisi politik deislamisasi milik Hourgronye, sebab realitanya penguasa hanya mengakomodisir kegiatan umat Islam yang bersifat ritual ibadah saja, sedangkan kegiatan politik umat dikerdilkan (Umar,2003).

Sebagai organisasi Islam dengan kondisi yang dimarjinalkan oleh kekuasaan Orde Baru, perkembangan organisasi Muhammadiyah dan aktifitas organisasi Islam tidak serta merta berhenti, banyak hal yang dilakukan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya dengan lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, termasuk dalam hal ini Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. Bagi Muhammadiyah di Banyuwangi membangun amal usaha yang bersifat sosial merupakan langkah jangka panjang yang menjanjikan bagi keberlangsungan dakwah yang dilakukan.

2. Hubungan Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sebagai komunitas Islam yang menjunjung ukhuwah Islamiyah, Muhammadiyah di

Banyuwangi berusaha menjalin hubungan dengan organisasi lain yang tujuannya untuk kelangsungan kegiatan dari organisasi Muhammadiyah dan kepentingan umat Islam secara umum. Namun, melihat kondisi daerah Banyuwangi dan kemampuan internal Muhammadiyah, kerja sama belum dilakukan secara efektif, akibatnya Muhammadiyah masih membenahi rumah tangganya sendiri. Kendati demikian, secara struktural organisasi memang belum secara maksimal dilakukan terobosan yang melibatkan organisasi lain, secara individu dari warga Muhammadiyah telah melakukan hubungan dan kerja sama dengan lain, seperti memperdayakan kemampuan ekonomi dari keluarga besar Muhammadiyah. Terlebih, lahirnya reformasi telah memberikan pekerjaan baru, yaitu membangun ekonomi umat Islam.

Hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dan organisasi lain di Banyuwangi, sebagian besar hanya didominasi oleh hubungan antara Muhammadiyah dengan NU. Kendati hampir tidak pernah bekerja sama dalam satu forum, sikap saling menghormati antara dua organisasi yang telah dilakukan oleh para elit masing-masing organisasi, merupakan sebuah wujud kerja sama yang sangat menguntungkan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Nur Syam dalam buku *Islam Pesisir*, sebab di daerah Tuban di temukan sebuah fenomena yang menengahkan konflik antara elite organisasi Muhammadiyah dan NU yang memiliki kedekatan wahana medan budaya dengan kalangan *abangan*.

Namun, Muhammadiyah juga mulai merintis kerja sama dengan organisasi lain, terutama yang mempunyai spesifikasi pada skill dan pelatihan. Pengembangan ekonomi keluarga besar Muhammadiyah di Banyuwangi menjadi prioritas utama, termasuk meningkatkan peran serta dan kemampuan dari bidang kewanitaan Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Aisiyah. Sedang untuk kerja sama dalam bidang sosial, seperti kerja sama dalam pengembang Panti Asuhan Al-Maskun yang melibatkan beberapa yayasan sosial-yayasan Dharmais-

yang programnya membantu kegiatan yang bersifat sosial.

Sedikitnya frekuensi hubungan yang dijalin oleh Muhammadiyah dengan organisasi lain di Banyuwangi lebih disebabkan oleh faktor internal yang belum mampu secara riil mengembangkan organisasi Muhammadiyah di Banyuwangi. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kondisi politik masyarakat secara lokal telah mempengaruhi kegiatan Muhammadiyah.

3. Hubungan Dengan Organisasi Politik
Berbicara mengenai hubungan antara Muhammadiyah dengan organisasi politik, merupakan sebuah nostalgia panjang yang selalu mewarnai kehidupan dan perjalanan dari organisasi Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Banyuwangi, bersamaan dengan itu saluran politik Muhammadiyah-partai Masyumi-dibubarkan oleh penguasa Orde Lama. Sebagai organisasi Islam yang memiliki status istimewa dalam Masyumi, dibubarkan Masyumi sebagai saluran politik, Muhammadiyah akhirnya ketika memasuki pergantian penguasa Orde Baru, Muhammadiyah ikut membidani pendirian Parmusi (Shobron,2003).

Namun demikian, setelah terjadinya konflik dalam tubuh Parmusi-konflik yang dibidani penguasa-telah membuat Muhammadiyah untuk keluar dari kegiatan politik praktis. Setelah kembalinya Muhammadiyah pada jalur sebelumnya, yaitu menggunakan saluran sosial dan kemasyarakatan, organisasi ini sibuk dengan kegiatan internalnya yang berupa pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Memang menurut beberapa pengamat, setelah Muhammadiyah kembali sebagai gerakan sosial, organisasi ini terlihat sibuk dengan aktivitas internalnya. Namun, keadaan bukan karena tidak ada alasan yang jelas, sebab dengan memperhitungkan kekuasaan penguasa yang cenderung otoriter, sikap politik yang akomodatif lebih 'aman' dan efisien untuk kelanjutan dakwah yang di kembangkan Muhammadiyah khususnya dan organisasi Islam lainnya, secara umum (Nashir,2001).

Kendati, tidak bergerak dalam politik praktis lagi, Muhammadiyah tetap menjaga hubungan baik dengan para kontestan partai

politik yang ada. Lebih lanjut, ketika Golkar dan pemerintah sedang menguasai suhu perpolitikan Indonesia, apalagi dengan politik monoloyalitasnya, banyak warga Muhammadiyah yang aktif di dalam Golkar, termasuk menjadi kader dan tim sukses. Fenomena ini terjadi di semua wilayah Muhammadiyah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Banyak warga Muhammadiyah yang duduk aktif sebagai kader Golkar, diantaranya Muhammad Syarbini-elite Muhammadiyah Banyuwangi-yang duduk sebagai fungsionaris Golkar.

Hal tersebut, sama dengan apa yang ditemukan Mulkan (2000) di daerah Jember, sebuah situasi yang menengahkan warga Muhammadiyah untuk ikut serta dalam lingkungan penguasa, baik merupakan kerelaan atau cenderung merupakan sikap keterpaksaan. Sementara itu, bagi warga Muhammadiyah yang tidak bekerja di Instansi pemerintah tetap cenderung untuk berkiprah dalam partai Islam PPP (Wawancara, Rohmat 23 Nopember 2005).

Hubungan yang terjalin antara organisasi politik dengan Muhammadiyah di Banyuwangi ketika penguasa Orde Baru berkuasa, memiliki kecenderungan untuk lebih banyak berkiprah dalam Golkar, dibanding sebuah sikap netral yang selama ini di kedepankan warga Muhammadiyah. Kendati permasalahan ini dilakukan oleh warga Muhammadiyah dengan kapasitas sebagai individu bukan dilakukan secara struktural organisasi.

Memasuki alam reformasi, apalagi kehidupan demokrasi mulai di dilaksanakan dengan konsisten. Berdasarkan amanat Muktamar dan Tanwir, Muhammadiyah memberi kebebasan bagi warganya yang ahli dalam bidang politik untuk mendirikan partai politik (Shobron, 2003:169). Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh Amien Rais-pada saat itu sebagai ketua PP Muhammadiyah telah mendapatkan banyak dukungan dari warga Muhammadiyah, apalagi banyak sikap dan pandangan dari warga Muhammadiyah mengenai berdirinya sebuah partai politik dari hasil pemikiran dan kerja kader Muhammadiyah (Nashir, 2001). Ada diantara warga Muhammadiyah yang menanggapi

dengan semangat *enthusiasm*, realitanya banyak elit dan warga yang duduk menjadi pengurus PAN, termasuk warga Muhammadiyah di Banyuwangi.

Akan tetapi, terdapat pula sedikit konflik antar beberapa kalangan dalam tubuh Muhammadiyah terutama warga dan elite Muhammadiyah yang masih duduk di Golkar maupun di dalam partai-partai yang lain seperti Partai Keadilan, PBB, Dan PPP. Hal ini, juga diakui oleh Mohammad Husain, ketika polemik ini muncul dalam wilayah Banyuwangi (Wawancara, 23 Agustus 2005). Sementara itu, munculnya PAN telah menjadi batu ujian dan pemikiran baru yang signifikan bagi komunitas Muhammadiyah. Tarik menarik antara dukungan terhadap Amien Rais dan tuntutan untuk menjaga netralitas sikap politik Muhammadiyah telah mengemuka dalam komunitas Muhammadiyah. Namun, secara struktural Muhammadiyah tetap menjadi sebuah organisasi yang tetap pada jalur sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini, juga terlihat di Kabupaten Banyuwangi, dalam tubuh Muhammadiyah meskipun terpolarisasi menjadi beberapa kelompok antara yang mendukung PAN dengan yang menolak maupun yang cenderung mengakomodasi kedua sayap tersebut, tetap konsisten dengan kegiatan yang menjadi program Muhammadiyah selama ini.

2. Kedudukan Penting Muhammadiyah Dalam Masyarakat

Ketika kita berbicara mengenai peranan dan kedudukan penting yang dimiliki Muhammadiyah, terutama di daerah Banyuwangi, Muhammadiyah dapat menempatkan dirinya sebagai satu-satunya 'pemain' dan mewakili kalangan Islam yang berparadigma modern. Kemudian, ketika mengkaji gerakan Islam dalam masa Orde Baru, sebagaimana besar diketengahkan suatu fakta yang berupa kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sikap politik muncul umat Islam muncul dan mencuat ketika terjadi permasalahan yang berupa konflik yang menyangkut permasalahan fundamental, seperti kasus majalah *Monitor*. Kejadian yang hanya menengahkan kegiatan yang bersifat sosial-pendidikan, dakwah dan

kesehatan-bukan karena faktor tidak mampunya organisasi Islam yang ada, termasuk Muhammadiyah. Akan tetapi, merupakan sebuah upaya sistematis dari penguasa untuk menstabilkan suhu politik negara.

Melihat kenyataan yang berupa keterbatasan ruang gerak, organisasi Islam lebih memilih untuk mengembangkan kegiatan sosial, baik melalui institusi pendidikan, kesehatan maupun yayasan yang sebagian besar berupa pelayanan terhadap umat secara sistematis. Adanya kesimpulan dari beberapa ahli, seperti dikemukakan Sudarno Shobron (2003; Thaba,1996;) tentang munculnya elite intelektual baru muslim, seperti Azyumardi Azra, Syafei Ma'arif, Abdurrahman Wahid, Dawam Raharjo dan generasi muda penerusnya-hampir seluruhnya berpendidikan barat-lebih menekankan gerakan dan pendekatan kultural dan mulai menggeser pendekatan ideologis untuk membangun dan mencerdaskan umat Islam yang kondisinya tertinggal.

Secara riil-tataran substansif-solusi yang ditawarkan para elite memang memberikan harapan, tetapi yang terlupa dari mereka, bahwa pertarungan ideologis dalam masyarakat Indonesia masih secara masif terus berlangsung, apalagi ketika 'kran' reformasi dibuka keinginan umat Islam yang diwakili gerakan Islam-terutama berwajah ideologis bermunculan-menginginkan pendekatan ideologis daripada sebuah pendekatan kultural. Sebuah pendekatan yang cenderung 'memaksa' masyarakat yang berbeda dan mempunyai karakter tersendiri untuk menyamakan perbedaan.

Terlepas dari tarik menarik antar pendekatan ideologis dan kultural, organisasi Muhammadiyah pada kenyataannya masih menikmati kegiatan yang bersifat sosial. Bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan pemantapan ideologis umat Islam, harus ditunjang dengan pendidikan dan sarana sosial lainnya yang memadai, atau kebijakan yang diambil Muhammadiyah merupakan proses jangka panjang yang suatu saat sangat dibutuhkan.

1. Peranan Dalam Bidang Sosial

Diakui atau tidak, umat Islam harus berterima kasih atas perjuangan Muhammadiyah yang lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan kegiatan sosial, seperti pembangunan Panti Asuhan dan rumah singgah. Muhammadiyah di Banyuwangi pada dasarnya telah berhasil mewakili sekaligus menutup kekurangan umat Islam, terutama dibidang sosial, sebagai contoh pembangunan Panti Asuhan Al-Maskun merupakan sebuah upaya sosial yang bernuansa ideologis. Sebab selama ini kegiatan yang memberikan pelayanan umat Islam di Banyuwangi lebih didominasi oleh komunitas non-muslim. Memang ada proyek pembangunan aspek sosial yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi untuk aspek ideologis jauh dari keinginan kalangan Islam. Terlebih, pendekatan tersebut belum menarik perhatian organisasi NU-sebagai organisasi Islam-di Banyuwangi.

Kendati, Muhammadiyah bertujuan mewujudkan masyarakat muslim yang ideal dengan pendekatan yang akomodatif, tetapi dalam pelaksanaan untuk mensosialisasikan pemahamannya cenderung puritan (Nashir,2001). Selanjutnya sesuatu yang yang dapat dibangun dan diperlihatkan oleh Muhammadiyah dalam komponen masyarakat adalah kehidupan riil warga Muhammadiyah yang dapat memadukan kehidupan religius dengan pendekatan modern, salah satunya latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh warga Muhammadiyah.

Ketika dibandingkan dengan keberhasilan Muhammadiyah di daerah lain, perkembangan amal usaha yang bersifat sosial, cenderung tertinggal. Namun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Muhammadiyah di Banyuwangi, organisasi ini berusaha untuk mewujudkan potensi yang ada. Memang banyak diakui mundurnya SDM yang dimiliki Muhammadiyah berkaitan erat dengan berkurangnya regenerasi Muhammadiyah yang cenderung stagnan. Terlebih, Muhammadiyah telah mengalami titik klimaks, sehingga telah kehilangan sifat tajdid sebagai organisasi pembaharu. Organisasi Muhammadiyah sekarang dianggap hanya sibuk dengan amal usahanya, tanpa lagi kritis terhadap kondisi

lingkungan sekitarnya. Anggapan ini memang sangat berlebihan, sebab dewasa ini bermunculannya organisasi Islam yang lain dengan segala pendekatannya juga tidak bisa dipandang bukan merupakan sebuah pengaruh dari model gerakan yang dimiliki organisasi semacam Muhammadiyah.

Sementara itu, jika Muhammadiyah dapat berperan dalam dimensi sosial-ditunjang amal usaha-dapat menyentuh dan lapisan masyarakat karena organisasi ini mamadukan pendekatan transendental dengan duniawi yang seimbang. Ketika dewasa ini Muhammadiyah dianggap telah lepas dari kondisi sebelumnya, bisa jadi pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah-ketika elitnya bergeser kepada cemdekiawan-terasa kosong dari nuansa religius yang praksis dilakukan para pendalu Muhammadiyah sebelumnya.

Kemudian terobosan yang dilakukan Muhammadiyah di Banyuwangi berupa sistematika pembagian zakat, ibadah kurban yang diterapkan dimasyarakat dengan pendekatan yang lebih rasional, efektif dan tepat guna. Selama ini dalam pemabagian zakat, masyarakat cenderung memberikannya kepada para Kyai-faktor kharisma dan kehormatan, sedangkan para kalangan yang seharusnya menerima tidak mendapatkannya. Dalam perspektif Muhammadiyah, tradisi tersebut diganti, sehingga untuk pertama kalinya sempat terjadi konflik dengan kalangan NU. Dengan terobosan tersebut sedikit banyak membawa pengaruh terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan modern.

2. Peranan Dalam Bidang Pendidikan

Memasuki usianya yang hampir satu abad, Muhammadiyah telah mempunyai beratus-ratus sampai beberapa ribu amal usaha pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk beberapa di daerah Banyuwangi. Sebagai organisasi Islam pertama di Banyuwangi yang menggunakan pendekatan pendidikan klasikal, Muhammadiyah untuk beberapa tahun awal berdirinya dapat memberikan pelayanan yang signifikan terhadap masyarakat Banyuwangi. Menurut Mohammad Husain, untuk dekade 1980-

1990, amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Banyuwangi cukup membantu masyarakat muslim, tetapi pada dasawarsa terakhir setelah pemerintah cukup berhasil dalam mengembangkan pembangunan pendidikan di daerah Banyuwangi, peranan organisasi ini mulai tergeser (Wawancara, 23 Agustus 2005).

Bergesernya pendekatan yang dilakukan oleh NU di Banyuwangi juga cukup mempengaruhi kelangsungan amal usaha Muhammadiyah. Ketika semula belum ada aset milik NU yang berupa sekolah-sekolah model klasikal, banyak warga NU yang memanfaatkan sekolah milik Muhammadiyah. Akan tetapi, setelah banyak sekolah milik NU yang dibangun, fanatisme kelompok mulai mencuat, sehingga ada beberapa sekolah milik Muhammadiyah yang tidak memenuhi kuota. Melihat realita seperti itu Muhammadiyah di Banyuwangi mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik sarana maupun proses pembelajaran yang dimiliki amal usaha pendidikan.

Untuk lokalitas Muhammadiyah di Banyuwangi, amal usaha yang dimilikinya mengalami penurunan, terlebih dalam penerimaan siswa. Banyaknya orientasi masyarakat yang lebih 'cerdas' untuk memilih sekolah pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab mundurnya amal usaha Muhammadiyah. Disamping kurang bisa bersaingnya pendidikan milik Muhammadiyah dengan sekolah negeri, sedangkan dengan masyarakat berbasis NU polarisasi masyarakat dalam memilih sekolah bukan merupakan permasalahan yang berarti bagi Muhammadiyah.

Kurangnya dana yang dimiliki warga Muhammadiyah termasuk salah satu faktor penghambat dalam perjalanan amal usaha pendidikan Muhammadiyah, akhirnya menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan pendanaan, merupakan korelasi dengan peningkatan ekonomi warga Muhammadiyah, apalagi peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. Sebab selama ini pendanaan kegiatan umat Islam berasal dari kalangan umat Islam sendiri, termasuk Muhammadiyah di Banyuwangi.

3. Peranan Dalam Bidang Politik

Kendati dipertegas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh tahun 1995, bahwa organisasi ini tidak mempunyai hubungan secara organisatoris dengan partai politik manapun, Muhammadiyah tetap memberi kebebasan berpolitik secara individu kepada warga Muhammadiyah (Shobron,2003:169). Dalam perjalanannya Muhammadiyah merupakan gerakan sosio-keagamaan dan kebudayaan-bernafas Islam-untuk dibedakan dengan organisasi semacam Syarikat Islam (SI) sebagai gerakan politik. Terlebih, menurut Geertz (2011), Muhammadiyah lebih mengesampingkan masalah-masalah politik dan lebih menaruh perhatian pada masalah-masalah agama.

Pengalaman sejarah terjun dalam politik praktis yang dialami oleh Muhammadiyah telah dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan politik dalam rangka kelangsungan organisasi dan memberi warna sendiri dalam sejarah politik di Indonesia (Shobron,2003:168). Untuk masa penguasa Orde Baru masih berkuasa Muhammadiyah memang hanya berprofesi sebagai 'pemain sosial', sedangkan memasuki masa reformasi Muhammadiyah yang dimotori oleh warga Muhammadiyah telah mendirikan partai politik, meskipun secara organisasi tidak ada hubungan dengan Partai yang didirikan Amien Rais.

Untuk kondisi di Banyuwangi, Muhammadiyah sewaktu Golkar masih mendominasi kehidupan politik Indonesia, banyak kader Golkar yang diperankan oleh elite Muhammadiyah. Setelah reformasi bergulir hal tersebut telah bergeser, banyak warga Muhammadiyah yang berperan dalam partai politik PAN. Namun, untuk peranan politik warga Muhammadiyah setelah lahirnya PAN, banyak peran politik Muhammadiyah yang tidak begitu dominan. Hal tersebut, disebabkan oleh mayoritas masyarakat lebih berafiliasi kepada partai politik yang berbasis Islam tradisional-PKB, PNU dan PPP-dan sebagian berafiliasi terhadap partai nasionalis, seperti Golkar dan PDIP.

Pada realitanya ketika akan berlangsung Pemilu, pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi banyak 'dikonjungi'

oleh para peserta Pemilu, hal ini wajar sebab Muhammadiyah meskipun mempunyai warga dan simpatisan yang kecil tetapi memiliki bergaining politik, terutama elit dan warganya yang menjadi figur masyarakat dan kedudukan yang dimiliki, baik di instansi pemerintah maupun di masyarakat. Namun, menurut Mohammad Abbas, Muhammadiyah selama ini menjaga netralitas dalam kehidupan politik praktis, sedangkan secara individu merupakan kebebasan warganya Muhammadiyah (Wawancara, 15 Agustus 2005).

Berkaitan dengan aktualisasi politik yang lebih bersifat individu, Muhammadiyah di Banyuwangi lebih dikenal berdasarkan platform pemahaman agamanya dibandingkan dengan peran politik secara struktural, sehingga untuk kelangsungan kegiatan organisasi, Muhammadiyah untuk kedepan lebih berpotensi dengan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan.

KESIMPULAN

Muhammadiyah di Banyuwangi dengan beberapa fenomena dan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

organisasi Muhammadiyah dalam perkembangannya di Pantai Utara Jawa, khususnya Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami konflik ketika pemahaman puritanisme dan modernisme Muhammadiyah dalam masyarakat di hadapkan dengan kehidupan yang tumpang tindih antara Islam dan tradisi. Terlebih, kenyataan lain tentang kehidupan organisasi NU yang telah menggurita dalam masyarakat, apalagi ditambah kehidupan patron-kliental yang melembaga, memang secara serta merta telah memperlambat perkembangan Muhammadiyah di Banyuwangi.

dengan didukung amal usahanya, Muhammadiyah berusaha menjadi 'pemain' dalam kehidupan sosio-keagamaan di Banyuwangi. Terlebih, kebanyakan elit Muhammadiyah berperan langsung dalam kegiatan yang berupa penyebaran pengaruh pada masyarakat, baik dari pimpinan daerah maupun pimpinan cabang.

kondisi politik nasional yang sangat mempengaruhi kehidupan gerakan Islam, juga mempengaruhi Muhammadiyah. Kebijakan politik pemerintah seperti *floating mass*, kebijakan monoloyalitas dan asas tunggal sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah di kabupaten Banyuwangi.

dalam langkah pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah ketika mengacu pada perjalanan sejarahnya, lebih mempunyai prospek yang lebih diterima masyarakat dengan berada di jalur sosio-religi-kultural daripada menggunakan pendekatan dan perjuangan dengan politik praktis, baik membuat partai sendiri maupun bergabung dengan partai Islam yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed). 1980. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Abdurrohman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Chaidar. 1999. *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Jakarta: Darul Falah.
- Akbar, Anwar Ali & Mas'ud. 2002. *Muhammadiyah dan Harapan Masa Depan*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Arifin, M.T. 1990. *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*. Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan.
- Antlov, Hans & Sven cederroth. 2001. *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus Perintah Otoriter*. Penj. P. Suminto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan*
- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU: Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Rencana Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS
- Ch, Jb. Masroer. 2004. *The History Of Java Sejarah Perjumpaan Agama-Agama Di Jawa*. Yogyakarta: Ar-Ruuz.
- Damami, Mohammad. 2000. *Akar Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Darban, Ahamad Adaby. 2000. *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Dhofeir, Zamakhsary. 1984. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Geertz, Clifford. 2011. *Abangan Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Aswah Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Graaf, HJ. de. 2003. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan Abad XVI*. Terj. Eko Endarmoko. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan.
- Muhadi. 1997. *Kegiatan Muhammadiyah Dalam Dakwah Islamiyah Di Kabupaten Rembang*. Skripsi. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo.
- Mulkan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Mursidi, Agus, 2019. et al. *The Rise Ideology of Kiai at State Senior High School Darussolah Singojuruh Indonesia*. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 2, Ver. 1 (February. 2018) PP 66-71*
<http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue2/Version-3/C021232131.pdf>
- Mursidi, Agus, 2019 *Commodification Education at Darussolah Senior High School on Singojuruh, Banyuwangi-East Java Province*, *International Journal for Educational and Vocational Studies*. Vol. 1 No. 5. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ijevs/article/view/1449>
- Moleong Lexi, J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Posda karya*, Bandung
- Nashir, Haedar. 2001. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pranowo, M. Bambang. 1998. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi kuasa*. Yogyakarta: Adiata Karya Nusa.

- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terjemahan Satrio Wahono. dkk. Jakarta: Ilmu Semesta
- Suhartono, Prof. Dr. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Supriyo, Agung. 2005. *Peluang Konsensus Umat Islam*. Dalam *Jurnal AKSES*. No. 2. Vol 1. Maret. Hal 105-110.
- Sobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah Dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suara Muhammadiyah.1999. *Koalisi Suatu Keharusan Sejarah*. No. 12. 84. 16-31 Juni. Hal 14-15.
2002. *Umat Islam Tidak punya Strategi*. No. 18. 87. 16-30 September. Hal 7-8.
2002. *Kristalisasi Strategi Politik*. No. 18. 87. 16-30 September. Hal 9-20.
- Suara Hidayatulloh*. 2004. *Tanda Tanya Muhammadiyah*. Edisi Februari. Hal 3.
- Tebba, Sudirman. 2001. *Islam Menuju Era Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam Dan Negara Dalam politik Orde Baru*. Jakarta: Gama Insani Press.
- Umar, Hussein. 2003. *Pengkhianatan Atas Islam*. Dalam *Sabili*. No. 9. Tahun X. Hal 83-87.